



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 98 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 98

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

2025



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
[Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat]

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Sekretariat DPRD.

Soreang, April 2025

SEKRETARIS DPRD

UWAIS QORNI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700815 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud Dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD.....	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	13
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD	15
	2.4. Review Terhadap RKPD P.....	16
	2.5. Penelaahan Usulan Program.....	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	27
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	28
	3.3. Program Dan Kegiatan	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	47
BAB V	PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Tabel 2.1 : Capaian Kinerja Program Tahun 2024.....	7
2.	Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja (T-C.29) Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung.....	8
3.	Tabel 2.3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD (T-C.30) Kabupaten Bandung	14
4.	Tabel 2.4 : Review Terhadap RKPD P Tahun 2025 Sekretariat (T-C.31) DPR Kabupaten Bandung.....	17
5.	Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	30
6.	Tabel 3.2 : Tabel Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
7.	Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun (T-C.33) 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.....	41
7.	Tabel 4.1 : Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Selanjutnya, Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 untuk selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sesuai dokumen Renja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA P 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) Sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Berikut ini merupakan capaian kinerja masing-masing program pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2024:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024

No.	Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	96.12%	96.12%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	79.22%	79.22%

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2024 mayoritas program terealisasi, namun beberapa program belum dapat terealisasi secara optimal, mengingat pada tahun 2024 ada kegiatan yang secara pewartuan tidak dapat disesuaikan, sehingga belanja kegiatan baik belanja modal maupun belanja operasi lainnya tidak dapat terserap sepenuhnya. Selain itu, terdapat kelebihan sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih lebih dari sisa belanja akibat Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rill yang telah dilaksanakan.

Namun secara umum keseluruhan program kegiatan masih memiliki capaian kerja yang baik.

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan
Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Nilai AKIP -Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	-75 Poin - 80 Persen	-74,70 Poin - 90,84 Persen	-74,70 Poin - 80 Persen	-80,10 Poin - 93,86 Persen	-80,10 Poin - 93,86 Persen	-80,10 Poin - 80 Persen	-0 Poin - 0 Persen	-154.8 Poin - 184.7 Persen	-206.4 Persen - 230.87 Persen
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	59,04 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	14.28 Persen	173.32 Persen	173.32 Persen
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	8 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	73.33%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	63,33 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	14.99 Persen	14.99 Persen	14.99 Persen
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/bulan	1980 Orang/bulan	540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	100%	540 Orang/Bulan	144 Orang/Bulan	2664 Orang/Bulan	98.66%
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Vengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	2 Dokumen	50 Dokumen	83.33%
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	80%
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%

4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	117,93 Persen	100 Persen	202,25 Persen	202,25 Persen	100 Persen	42.16 Persen	42.16 Persen	42.16 Persen
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	0 Paket	8 Paket	53.33%
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	275 Orang	588 Orang	55 Orang	153 Orang	278%	55 Orang	46 Orang	787 Orang	286.18%
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	85 Orang	35 Orang	80 Orang	229%	35 Orang	15 Orang	180 Orang	240%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	69,21 Persen	100 Persen	94,81 Persen	94,81 Persen	100 Persen	8.51 Persen	8.51 Persen	8.51 Persen
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	32 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	0 Paket	48 Paket	60%
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	345 Paket	241 Paket	69 Paket	69 Paket	100%	69 Paket	0 Paket	310 Paket	89.85%
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket	130 Paket	18 Paket	24 Paket	133,33%	18 Paket	0 Paket	154 Paket	171.11%
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	35 Paket	10 Paket	15 Paket	150%	10 Paket	2 Paket	52 Paket	104%
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	46 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	0 Paket	61 Paket	81.33%
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	525 Dokumen	541 Dokumen	180 Dokumen	126 Dokumen	70%	180 Dokumen	0 Paket	667 Paket	127.04%
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0
4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	26 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	2 Laporan	33 Laporan	94.28%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	26,66 Persen	100 Persen	283,33 Persen	283,33 Persen	100 Persen	0 Persen	65 Persen	65 Persen
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	6 Unit	600%	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	2 Paket	5 Paket	250%	2 Paket	0 Paket	13 Paket	130%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	60 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.44 Persen	19.44 Persen	19.44 Persen
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	51 Laporan	85%
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 Persen	175,66 Persen	100 Persen	117,81 Persen	117,81 Persen	100 Persen	0.89 Persen	0.89 Persen	0.89 Persen
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	11 Unit	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	11 Unit	44%
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	79 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	0 Unit	99 Unit	99%
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	7 Unit	50 Unit	55 Unit	110%	50 Unit	0 Unit	62 Unit	310%
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	161 Unit	64 Unit	126 Unit	196.87%	64 Unit	4 Unit	291 Unit	1455%
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	8 Unit	3 Unit	6 Unit	200%	3 Unit	0 Unit	14 Unit	116.66%
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	0 Unit	14 Unit	350%

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	100 Persen	55,83 Persen	100 Persen	93,88 Persen	93,88 Persen	100 Persen	8.33 Persen	8.33 Persen	8.33 Persen
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	3300 Orang/Bulan	1980 Orang/Bulan	660 Orang/Bulan	659 Orang/Bulan	99,84%	660 Orang/Bulan	165 Orang/Bulan	2804 Orang/Bulan	84.96%
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	26 Paket	15 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	0 Paket	21 Paket	80.76%
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	275 Orang	137 Orang	55 Orang	45 Orang	81,81%	55 Orang	0 Orang	182 Orang	66.18%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	100 Persen	41,66 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.88 Persen	13.88 Persen	13.88 Persen
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	55 dokumen	0 dokumen	5 Dokumen	55 Dokumen	100%	5 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	100%
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	83.33%
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	65 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	5 Laporan	90 Laporan	90%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	- Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	- 100 Persen -100 Persen	- 100 Persen -100 Persen	- 100 Persen -100 Persen	- 116.66 Persen -66.46 Persen	- 116.66 Persen -66.46 Persen	- 100 Persen -100 Persen	- 10.07 Persen -13.87 Persen	- 10.07 Persen -13.87 Persen	- 10.07 Persen -13.87 Persen
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	100 Persen	68,75 Persen	100 Persen	150 Persen	150 Persen	100 Persen	0 Persen	95.41 Persen	95.41 Persen
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	40 Dokumen	38 Dokumen	8 Dokumen	11 Dokumen	137.50%	8 Dokumen	0 Dokumen	49 Dokumen	122.50%
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 Dokumen	35 Dokumen	8 Dokumen	13 Dokumen	162.50%	8 Dokumen	0 Dokumen	48 Dokumen	120%
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	4 dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	120%
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan /atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	10 Dokumen	15 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	0 Dokumen	16 Dokumen	160%
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	840 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan	100 Persen	60 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0 Persen	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	100 Persen	79,33 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30.21 Persen	105.60 Persen	105.60 Persen
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	65 Laporan	57 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	5 Laporan	75 Laporan	115.38%
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	65 Laporan	51 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	5 Laporan	69 Laporan	106.15%
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	65 Laporan	51 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	6 Laporan	70 Laporan	107.69%
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	65 Laporan	59 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	6 Laporan	78 Laporan	120%
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	60%
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	150%
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%

4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen	114,16 Persen	100 Persen	171.63 Persen	171.63 Persen	100 Persen	29.55 Persen	213.92 Persen	213.92 Persen
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	20 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	55 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	275%
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40 Dokumen	37 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	150%	8 Dokumen	6 Dokumen	55 Dokumen	137.50%
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40 Orang	0 Orang	8 Orang	4 Orang	50%	8 Orang	0 Orang	4 Orang	10%
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	480 Orang	276 Orang	96 Orang	96 Orang	100%	96 Orang	8 Orang	380 Orang	79.16%
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	49 Dokumen	17 Dokumen	13 Dokumen	76.47%	17 Dokumen	4 Dokumen	66 Dokumen	330%
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	240 Dokumen	970 Dokumen	80 Dokumen	500 Dokumen	625%	80 Dokumen	80 Dokumen	1550 Dokumen	645.83%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	100 Persen	72,14 Persen	100 Persen	66.46 Persen	66.46 Persen	100 Persen	13.87 Persen	94.835 Persen	94.835 Persen
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45 Laporan	24 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	33.33%	9 Laporan	2 Laporan	29 Laporan	64.44%
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	275 Dokumen	164 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	55 Dokumen	0 Dokumen	219 Dokumen	79.63%
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	275 Dokumen	483 Dokumen	165 Dokumen	109 Dokumen	66.06%	165 Dokumen	55 Dokumen	647 Dokumen	235.27%
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	300 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD	100 Persen	27,14 Persen	100 Persen	92.85 Persen	92.85 Persen	100 Persen	0 Persen	60.71 Persen	60.71 Persen
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	35 Laporan	19 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	85.71%	7 Laporan	0 Laporan	25 Laporan	71.42%
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi	100 Persen	602,08 Persen	100 Persen	158.33 Persen	158.33 Persen	100 Persen	2.08 Persen	634.16 Persen	634.16 Persen
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	240 Dokumen	1445 Dokumen	48 Dokumen	76 Dokumen	158.33%	48 Dokumen	1 Dokumen	1522 Dokumen	634.16%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi	100 Persen	136,77 Persen	100 Persen	115.38 Persen	115.38 Persen	100 Persen	21.73 Persen	184.74 Persen	184.74 Persen
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	60 Dokumen	13 Dokumen	8 Dokumen	61.53%	13 Dokumen	4 Dokumen	72 Dokumen	553.84%
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	20%
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	180 Dokumen	64 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	4 Dokumen	98 Dokumen	54.44%
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	28 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	14 Dokumen	200%	7 Dokumen	3 Dokumen	31 Dokumen	110.71%

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja kegiatan selama tahun 2021-2024 dapat dicapai dengan baik. Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Akhir Desember pencapaiannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang secara pewartuan tidak dapat disesuaikan, sehingga belanja kegiatan baik belanja modal maupun belanja operasi lainnya tidak dapat terserap sepenuhnya. Selain itu, terdapat kelebihan sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih lebih dari sisa belanja akibat Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rill yang telah dilaksanakan, sehingga sampai dengan akhir Desember tahun 2024 capaian Renstra Sekretariat DPRD menunjukkan hasil yang kurang optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Kabupaten Bandung adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Meningkatnya pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan;
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD.

Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
3. Nilai AKIP;
4. Persentase BMD dalam Keadaan Baik.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator-indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai AKIP			67	68	74,70	75	76	74,70	80,10	80,10	81	
4	Persentase BMD dalam Kondisi Baik			80%	80%	80%	80%	80%	82,77%	93,86%	80%	80%	

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang belum optimal realiasi capaian kinerjanya, dikarenakan adanya pewaktuan yang tidak cukup dalam merealisasikan kegiatan belanja modal maupun belanja operasi.
2. Capaian kinerja lebih rendah daripada realisasi anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya namun kinerjanya belum tercapai penuh.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2023 dan 2024, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan pewaktuan yang baik dalam merealisasikan kegiatan belanja modal maupun belanja operasi (perjalanan dinas) anggota DPRD, sehingga dapat mencapai target penyerapan anggaran;
2. Melakukan penyusunan SSH dan SBU yang sesuai, sehingga meminimalisir sisa lebih anggaran akibat selisih standar harga yang terlalu tinggi dibandingkan standar harga riil yang direalisasikan;
3. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
2. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada;
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan dan ketersediaan dana *cash budget* yang disusun;
4. Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan.
5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

2.4 **Review Terhadap RKPD P**

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan RKPD P dengan program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 memang beberapa usulan yang diajukan di dalam RKPD P tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembanggaran didaerah adalah sebagai berikut : *Tabel 2.3 Review terhadap RKPD P tahun 2025.*

Tabel 2.4 (T-C.31)

Review Terhadap RKPD P Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Kode Rek					RKPD P				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	02				Sekretariat DPRD			119,934,616,451.00	Sekretariat DPRD				130,513,197,416.00	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik	70 80%	93,373,883,973.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		- Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik	70 80%	88,962,904,550.00	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	158,850,227.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	271,769,500.00	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,995,400.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29,176,759.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	34,655,000.00	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	33,192,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	36,183,500.00	
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,740,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,900,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	60,601,568.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	130,931,000.00	

4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2,244,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10,000,000.00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	11,247,945,980.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	12,649,440,300.00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/Bulan	11,086,075,185.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18,085,300.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18,085,300.00	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	88,347,995.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	98,108,000.00	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	55,437,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	76,976,000.00	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		1,269,708,100.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		1,513,172,800.00	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	131,400,000.00	
4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	181,775,200.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	302,000,000.00	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1,087,932,900.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1,079,772,800.00	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	4,178,172,366.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	3,866,135,900.00	
4.00	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00	

4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	1,582,393,600.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	808,504,100.00	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	672,320,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	187,120,000.00	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	145,107,800.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	204,783,300.00	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	335,358,600.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	792,215,500.00	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	300,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	300,000,000.00	
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan/Material	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25,400,000.00	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	965,365,956.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	985,300,000.00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	147,626,410.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	532,813,000.00	
4.00	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100%	2,335,972,200.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100%	50,000,000.00	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	800,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1,535,972,200.00	Pengadaan Mebel	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50,000,000.00	

4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,494,921,800.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,309,935,050.00	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	20,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	20,000,000.00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486,905,050.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486,905,050.00	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,988,016,750.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,803,030,000.00	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	2,857,067,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	1,303,372,000.00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	464,850,000.00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	283,930,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	456,622,000.00	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	60,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	15,000,000.00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	214,327,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	246,400,000.00	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2,298,810,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000.00	
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	70,500,000.00	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	100%	65,654,763,300.00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	100%	65,659,280,000.00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	660 Orang/Bulan	64,774,408,300.00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	660 Orang/Bulan	64,775,505,000.00	

4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275 Paket	746,330,000.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275 Paket	748,050,000.00	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	134,025,000.00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	135,725,000.00	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitas kegiatan Administrasi tugas DPRD	100%	1,176,483,000.00	Layanan Administrasi DPRD		Persentase fasilitas kegiatan Administrasi tugas DPRD	100%	1,339,799,000.00	
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	-	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	10,000,000.00	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	405,600,000.00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	557,700,000.00	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	770,883,000.00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	772,099,000.00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100% 100%	26,560,732,478.00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang	100% 100%	41,550,292,866.00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	100%	3,756,267,000.00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	100%	10,246,740,020.00	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	546,601,000.00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	5,588,680,000.00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang Ditetapkan	8 Dokumen	2,651,239,800.00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Rancangan Perda yang Ditetapkan	8 Dokumen	4,138,417,800.00	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan	1 Dokumen	179,356,000.00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan	1 Dokumen	104,606,000.00	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	2 Dokumen	379,070,200.00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	2 Dokumen	192,250,200.00	
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	280 Orang	222,786,020.00	

4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	3,936,835,088.00	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	5,158,312,796.00	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	1,085,147,000.00	Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	626,741,600.00	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	575,023,000.00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	413,459,000.00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	907,721,000.00	Pembahasan APBD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1,738,260,396.00	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	590,560,888.00	Pembahasan APBD Perubahan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1,278,703,800.00	
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	253,254,000.00	Pembahasan Laporan Semester	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	217,586,000.00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	525,129,200.00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	883,562,000.00	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	100%	3,465,500,302.00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	100%	7,718,210,612.00	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	671,200,574.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	1,645,907,603.00	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	688,974,776.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	1,651,887,603.00	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	704,182,476.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	1,651,887,603.00	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	753,180,976.00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	1,651,887,603.00	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	153,363,300.00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	168,477,100.00	

4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	102,024,000.00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	184,348,100.00	
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	392,574,200.00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	763,815,000.00	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	4,428,251,235.00	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	6,142,115,788.00	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5 Dokumen	20,617,000.00	Orientasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5 Dokumen	35,000,000.00	
4	02	02	2.04	0002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	8 Dokumen	2,151,435,100.00	Bimbingan Teknis DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	8 Dokumen	3,406,399,788.00	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	-	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	108,080,000.00	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi	96 Orang	584,320,000.00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi	96 Orang	637,440,000.00	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog	17 Dokumen	85,125,000.00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog	17 Dokumen	157,536,000.00	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	-	Penyusunan Program Kerja DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	80 Dokumen	1,586,754,135.00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		1,782,660,000.00	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	100%	9,394,117,500.00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	100%	9,852,657,500.00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	9 Laporan	104,245,000.00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	9 Laporan	150,000,000.00	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	21,505,000.00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	206,100,000.00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	55 Dokumen	9,268,367,500.00	Pelaksanaan Reses	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	55 Dokumen	9,346,557,500.00	

4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0 Orang	-	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	100 Orang	150,000,000.00	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	100%	264,298,600.00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	100%	297,842,650.00	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	264,298,600.00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	297,842,650.00	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	100%	33,267,044.00	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	100%	256,270,000.00	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	33,267,044.00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	256,270,000.00	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	100%	1,282,195,709.00	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	100%	1,878,143,500.00	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Laporan	584,388,432.00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Laporan	690,912,000.00	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 Dokumen	15,000,000.00	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi	3 Laporan	298,807,277.00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi	3 Laporan	372,926,500.00	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7 Dokumen	384,000,000.00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7 Dokumen	799,305,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Bandung untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi, antara lain :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung.

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan DPRD Oleh Sekretariat DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat kepada Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD	Nilai AKIP
		Persentase BMD dalam Keadaan Baik

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP			
				Persentase BMD dalam Kondisi Baik			
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu		
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya Pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diselesaikan tepat waktu		
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
12	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
13	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
14	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
15	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		
16	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
17	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
18	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
19	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
20	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
22	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
24	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	

25	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
26	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
27	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
28	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
29	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
30	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
31	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
32	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
33	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pemenuhan laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran		
34	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
35	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
36	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
37	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pengelolaan BMD dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		
38	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
39	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
40	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	

41	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
42	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
43	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
44	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pemenuhan layanan Anggota DPRD tepat waktu	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pemenuhan Kesejahteraan DPRD		
45	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	
46	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	
47	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	
48	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Tercapainya pemenuhan fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	Layanan Administrasi DPRD		Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD		
49	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
50	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	
51	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
52	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu			
				Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti			
53	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan		
54	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
55	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	

56	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	
57	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	
58	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	
59	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran		
60	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	
61	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
62	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Pembahasan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	
63	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	
64	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	
65	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
66	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase PD yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya		
67	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
68	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
69	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
70	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
71	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
72	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	
73	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	

74	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya		
75	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya orientasi DPRD	Orientasi DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	
76	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	
77	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
78	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
79	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	
80	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
81	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	
82	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti		
83	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja Dalam Daerah			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	
84	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	
85	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Reses	Pelaksanaan Reses			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	
86	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Anggota DPRD yang Diawasi		
87	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	
88	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	
89	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun		
90	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	
91	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatnya Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi		
92	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
93	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	
94	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
95	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bandung, maka pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 65 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **119.934.616.451,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

- 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak & penggandaan
- 1.4.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.4.7. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.1 . Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.2. Pemeliharaan Mebel
- 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
- 1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 1.8.3. Pelaksanaan *Medical Check Up*

1.9. Layanan Administrasi DPRD

- 1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- 1.9.2. Fasilitas Fraksi DPRD
- 1.9.3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2.1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS
- 2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 2.2.3. Pembahasan APBD
- 2.2.4. Pembahasan APBD Perubahan
- 2.2.5. Pembahasan Laporan Semester
- 2.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 2.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 2.3.5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 2.3.6. Pengawasan Penggunaan Anggaran

2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 2.4.1. Orientasi DPRD
- 2.4.2. Pendalaman Tugas DPRD
- 2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 2.4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 2.4.7. Penyusunan Program Kerja DPRD

2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 2.5.1. Kunjungan Kerja dalam Daerah
- 2.5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2.5.3. Pelaksanaan Reses

2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

2.6.1 Pengawasan Kode Etik DPRD

2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

2.7.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

2.8. Fasilitasi Tugas DPRD

2.8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2.8.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.8.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

2.8.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik		80,10 80%	93,373,883,973.00	APBD Kab. Bandung		80,10 80%	88,962,904,550.00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		100%	158,850,227.00	APBD Kab. Bandung		100%	271,769,500.00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	4,995,400.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	29,176,759.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	34,655,000.00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	33,192,500.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	36,183,500.00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	10,740,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	17,900,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	20,000,000.00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Semua Wilayah Pemda	1 Laporan	60,601,568.00	APBD Kab. Bandung		1 Laporan	130,931,000.00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	3 Laporan	2,244,000.00	APBD Kab. Bandung		3 Laporan	10,000,000.00

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100%	11,247,945,980.00	APBD Kab. Bandung		100%	12,649,440,300.00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Wilayah Pemda	540 Orang/Bulan	11,086,075,185.00	APBD Kab. Bandung		540 Orang/Bulan	12,456,271,000.00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Semua Wilayah Pemda	12 Dokumen	18,085,300.00	APBD Kab. Bandung		12 Dokumen	18,085,300.00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Semua Wilayah Pemda	2 Laporan	88,347,995.00	APBD Kab. Bandung		2 Laporan	98,108,000.00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	55,437,500.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	76,976,000.00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		100%	1,269,708,100.00	APBD Kab. Bandung		100%	1,513,172,800.00
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Wilayah Pemda	100 Paket	-	APBD Kab. Bandung		100 Paket	131,400,000.00
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	55 Orang	181,775,200.00	APBD Kab. Bandung		55 Orang	302,000,000.00
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Semua Wilayah Pemda	35 Orang	1,087,932,900.00	APBD Kab. Bandung		35 Orang	1,079,772,800.00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		100%	4,178,172,366.00	APBD Kab. Bandung		100%	3,866,135,900.00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	16 Paket	30,000,000.00	APBD Kab. Bandung		16 Paket	30,000,000.00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	69 Paket	1,582,393,600.00	APBD Kab. Bandung		69 Paket	808,504,100.00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	18 Paket	672,320,000.00	APBD Kab. Bandung		18 Paket	187,120,000.00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	10 Paket	145,107,800.00	APBD Kab. Bandung		10 Paket	204,783,300.00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	15 Paket	335,358,600.00	APBD Kab. Bandung		15 Paket	792,215,500.00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	180 Dokumen	300,000,000.00	APBD Kab. Bandung		180 Dokumen	300,000,000.00
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	1 Paket	-	APBD Kab. Bandung		1 Paket	25,400,000.00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	965,365,956.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	985,300,000.00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Wilayah Pemda	5 Dokumen	147,626,410.00	APBD Kab. Bandung		5 Dokumen	532,813,000.00

4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		80	2,335,972,200.00	APBD Kab. Bandung		80	50,000,000.00
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Wilayah Pemda	1 Unit	800,000,000.00	APBD Kab. Bandung			-
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Dibeli	Semua Wilayah Pemda	2 Unit	1,535,972,200.00	APBD Kab. Bandung		2 Unit	50,000,000.00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran		100%	4,494,921,800.00	APBD Kab. Bandung		100%	2,309,935,050.00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	20,000,000.00	APBD Kab. Bandung		2500 Laporan	20,000,000.00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Semua Wilayah Pemda	12 Laporan	486,905,050.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	486,905,050.00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Semua Wilayah	12 Laporan	3,988,016,750.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	1,803,030,000.00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		80%	2,857,067,000.00	APBD Kab. Bandung		80%	1,303,372,000.00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Wilayah Pemda	5 Unit	-	APBD Kab. Bandung		5 Unit	464,850,000.00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Wilayah Pemda	20 Unit	283,930,000.00	APBD Kab. Bandung		20 Unit	456,622,000.00
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Wilayah	50 Unit	60,000,000.00	APBD Kab. Bandung		50 Unit	15,000,000.00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Wilayah	64 Unit	214,327,000.00	APBD Kab. Bandung		64 Unit	246,400,000.00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Semua Wilayah Pemda	3 Unit	2,298,810,000.00	APBD Kab. Bandung		3 Unit	50,000,000.00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Semua Wilayah Pemda	6 Unit	-	APBD Kab. Bandung		6 Unit	70,500,000.00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu		100%	65,654,763,300.00	APBD Kab. Bandung		100%	65,659,280,000.00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang	Semua Wilayah	660 Orang/Bulan	64,774,408,300.00	APBD Kab. Bandung		660 Orang/Bulan	64,775,505,000.00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	Semua Wilayah	275 Paket	746,330,000.00	APBD Kab. Bandung		275 Paket	748,050,000.00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti	Semua Wilayah	55 Orang	134,025,000.00	APBD Kab. Bandung		55 Orang	135,725,000.00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	Semua Wilayah Pemda	100%	1,176,483,000.00	APBD Kab. Bandung		100%	1,339,799,000.00
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Jumlah Dokumen Hasil	Semua Wilayah	1 Dokumen	-	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	10,000,000.00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Semua Wilayah	12 Laporan	405,600,000.00	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	557,700,000.00

4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	20 Laporan	770,883,000.00	APBD Kab. Bandung		20 Laporan	772,099,000.00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu		100%	26,560,732,478.00	APBD Kab. Bandung		100%	41,550,292,866.00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di		100%	3,756,267,000.00	APBD Kab. Bandung		100%	10,246,740,020.00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen	546,601,000.00	APBD Kab. Bandung		8 Dokumen	5,588,680,000.00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen	2,651,239,800.00	APBD Kab. Bandung		8 Dokumen	4,138,417,800.00
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	179,356,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	104,606,000.00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	379,070,200.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	192,250,200.00
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang	Semua Wilayah Pemda	280 Orang	-			280 Orang	222,786,020.00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran		100%	3,936,835,088.00	APBD Kab. Bandung		100%	5,158,312,796.00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	1,085,147,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	626,741,600.00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	575,023,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	413,459,000.00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	907,721,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	1,738,260,396.00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	590,560,888.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	1,278,703,800.00
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	253,254,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	217,586,000.00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	525,129,200.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	883,562,000.00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya		100%	3,465,500,302.00	APBD Kab. Bandung		100%	7,718,210,612.00
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	671,200,574.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,645,907,603.00

4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Semua Wilayah	13 Laporan	688,974,776.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,651,887,603.00
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	704,182,476.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,651,887,603.00
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Semua Wilayah Pemda	13 Laporan	753,180,976.00	APBD Kab. Bandung		13 Laporan	1,651,887,603.00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	153,363,300.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	168,477,100.00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	Semua Wilayah	2 Dokumen	102,024,000.00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	184,348,100.00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	392,574,200.00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	763,815,000.00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya		100%	4,428,251,235.00	APBD Kab. Bandung		100%	6,142,115,788.00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Semua Wilayah Pemda	5 Dokumen	20,617,000.00	APBD Kab. Bandung		5 Dokumen	35,000,000.00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen	2,151,435,100.00	APBD Kab. Bandung		8 Dokumen	3,406,399,788.00
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar	Semua Wilayah	8 Orang	-	APBD Kab. Bandung		8 Orang	108,080,000.00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Semua Wilayah	96 Orang	584,320,000.00	APBD Kab. Bandung		96 Orang	637,440,000.00
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Semua Wilayah Pemda	17 Dokumen	85,125,000.00	APBD Kab. Bandung		17 Dokumen	157,536,000.00
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Semua Wilayah	1 Dokumen	-	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	15,000,000.00
4.02.02.2.04.0003	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan	Semua Wilayah	80 Dokumen	1,586,754,135.00	APBD Kab. Bandung		80 Dokumen	1,782,660,000.00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti		100%	9,394,117,500.00	APBD Kab. Bandung		100%	9,852,657,500.00
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Semua Wilayah Pemda	9 Laporan	104,245,000.00	APBD Kab. Bandung		9 Laporan	150,000,000.00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Semua Wilayah Pemda	55 Dokumen	21,505,000.00	APBD Kab. Bandung		55 Dokumen	206,100,000.00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Semua Wilayah Pemda	55 Dokumen	9,268,367,500.00	APBD Kab. Bandung		55 Dokumen	9,346,557,500.00
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Semua Wilayah Pemda	100 Orang	-	APBD Kab. Bandung		100 Orang	150,000,000.00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Diawasi		100%	264,298,600.00	APBD Kab. Bandung		100%	297,842,650.00
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Wilayah Pemda	7 Laporan	264,298,600.00	APBD Kab. Bandung		7 Laporan	297,842,650.00

4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun		100%	33,267,044.00	APBD Kab. Bandung		100%	256,270,000.00
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Semua Wilayah Pemda	48 Dokumen	33,267,044.00	APBD Kab. Bandung		48 Dokumen	256,270,000.00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi		100%	1,282,195,709.00	APBD Kab. Bandung		100%	1,878,143,500.00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Semua Wilayah Pemda	13 Dokumen	584,388,432.00	APBD Kab. Bandung		13 Dokumen	690,912,000.00
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat	Semua Wilayah	1 Laporan	15,000,000.00	APBD Kab. Bandung		1 Laporan	15,000,000.00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Semua Wilayah Pemda	3 Dokumen	298,807,277.00	APBD Kab. Bandung		3 Dokumen	372,926,500.00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Semua Wilayah Pemda	7 Dokumen	384,000,000.00	APBD Kab. Bandung		7 Dokumen	799,305,000.00
JUMLAH					119,934,616,451.00				130,513,197,416.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD P) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Renja Perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Renja Perubahan program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			93,373,883,973.00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	158,850,227.00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,995,400.00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	29,176,759.00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	33,192,500.00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,740,000.00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,900,000.00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	60,601,568.00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2,244,000.00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	11,247,945,980.00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/Bulan	11,086,075,185.00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18,085,300.00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	88,347,995.00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	55,437,500.00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	1,269,708,100.00
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	181,775,200.00
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1,087,932,900.00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	4,178,172,366.00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	69 Paket	1,582,393,600.00

4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	672,320,000.00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	145,107,800.00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	335,358,600.00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	300,000,000.00
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	965,365,956.00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	147,626,410.00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100%	2,335,972,200.00
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	800,000,000.00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1,535,972,200.00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100%	4,494,921,800.00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	20,000,000.00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486,905,050.00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,988,016,750.00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	2,857,067,000.00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	-
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	283,930,000.00
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	60,000,000.00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	214,327,000.00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2,298,810,000.00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	100%	65,654,763,300.00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/Bulan	64,774,408,300.00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275 Paket	746,330,000.00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	134,025,000.00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	100%	1,176,483,000.00
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	-
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	405,600,000.00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	770,883,000.00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100% 100%	26,560,732,478.00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan	100%	3,756,267,000.00

4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	546,601,000.00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2,651,239,800.00
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	179,356,000.00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	379,070,200.00
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	280 Orang	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	3,936,835,088.00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	1,085,147,000.00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	575,023,000.00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	907,721,000.00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	590,560,888.00
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	253,254,000.00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	525,129,200.00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	100%	3,465,500,302.00
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	671,200,574.00
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	688,974,776.00
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	704,182,476.00
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	753,180,976.00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	153,363,300.00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	102,024,000.00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	392,574,200.00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	4,428,251,235.00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5 Dokumen	20,617,000.00
4.02.02.2.04.0002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	8 Dokumen	2,151,435,100.00
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 Orang	-
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang	584,320,000.00
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	17 Dokumen	85,125,000.00
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 Dokumen	-
4.02.02.2.04.0003	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	80 Dokumen	1,586,754,135.00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	100%	9,394,117,500.00
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	9 Laporan	104,245,000.00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	21,505,000.00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	55 Dokumen	9,268,367,500.00
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0 Orang	-

4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	100%	264,298,600.00
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	264,298,600.00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	100%	33,267,044.00
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	33,267,044.00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	100%	1,282,195,709.00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	584,388,432.00
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	15,000,000.00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	298,807,277.00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7 Dokumen	384,000,000.00
JUMLAH				119,934,616,451.00

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA-PPAS/R-APBD Perubahan Tahun 2025.

Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada tahun 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025, menjadi dasar bagi penyusunan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Renja Perubahan tahun 2025 merupakan dasar asumsi pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Akhir kata, semoga Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan.

SEKRETARIS DPRD

ttd

UWAIS QORNI

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA